

HARMONISASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA *MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS**

Emmy Latifah

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail: emmylatifah_04@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to understand the level of harmonization of poverty alleviation regulations and policies in Indonesia within the Millennium Development Goals (MDGs), especially Target 1. From this research, it can be created a model of regulation and policies harmonization of poverty alleviation in Indonesia in order to harmony with the MDGs. To achieve these objectives, data collected by regulation and policies of poverty alleviation in Indonesia, and then it is analyzed with editing analysis style. The results of this research are the policies of poverty alleviation in Indonesia are not harmonious with the MDG target. It is because of the poverty alleviation policies in Indonesia with the MDG target as a result of differences in defining poverty, which is not focused on the definition of poverty used by the MDGs. The definition of poverty according to the MDGs is those who have income less than US\$ 1 per day.

Key words: harmonization of regulations and policies, poverty alleviation, Millennium Development Goals.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan Deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs), khususnya Target 1. Dari penelitian ini, maka dapat disusun sebuah model harmonisasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang harmonis dengan Deklarasi MDGs dan juga disusun langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah agar harmonisasi tersebut dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dikumpulkan data peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang selanjutnya dianalisis dengan *edyting analysis style*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia belum harmonis dengan Target MDGs. Belum harmonisnya kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan Target MDGs tersebut sebagai akibat dari perbedaan dalam mendefinisikan kemiskinan. Definisi kemiskinan menurut MDGs adalah mereka yang memiliki penghasilan kurang dari US\$ 1 per hari. Sedangkan definisi kemiskinan di Indonesia menggunakan banyak parameter yang berlainan.

Kata kunci: harmonisasi peraturan dan kebijakan, pengentasan kemiskinan, *Millenium Development Goals*.

Pendahuluan

Kemiskinan adalah masalah serius yang dihadapi dunia saat ini. Walaupun pembangunan di bidang sosial dan ekonomi telah menjadi agenda di setiap negara di dunia, namun kenyataannya, hingga tahun 2005, terdapat 1,4 milyar manusia di dunia ini berada dalam garis kemiskinan.¹ Selain merampas hak hidup dan

harapan seseorang, kemiskinan juga telah menjadi penyebab utama kelaparan. Pada 2006, 854 juta orang di seluruh dunia mengalami ke-

hun I) yang dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 30/SP2H/PP/DP2M/VII/2010 Tanggal 24 Juli 2010

¹ Berdasarkan ukuran kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan 1,25 US\$ per hari. Selanjutnya lihat Roy L. Prosterman, Robert Mitchel, Tim Hanstand (eds), 2007, *One Billion Rising: Law, Land and The Alleviation of Global Property*, Nederland: Leiden University Press, hlm. 17.

* Artikel ini adalah hasil dari Penelitian Hibah Kompetitif Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2010 (Ta-

laparan dan gisi buruk.² Oleh sebab itu, maka pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama dalam proses pembangunan di setiap negara.³

Pengentasan kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan mempunyai dimensi tantangan lokal, nasional, regional maupun global. Upaya mengatasi masalah kemiskinan karenanya tak bisa dilepaskan dari strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu negara.⁴ Upaya ini juga perlu diharmonisasikan juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada ditingkat internasional guna menjawab tantangan globalisasi.⁵ Sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani Deklarasi *Millennium Development Goals* (MDGs), Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakan program-program MDGs serta menjadikan program-program MDGs sebagai bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah, dan panjang. Termasuk dalam hal ini adalah program pengentasan kemiskinan.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda/prioritas pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia bersama semua perangkat negara dan seluruh unsur masyarakat memikul tanggung jawab untuk memberantas kemiskinan guna memenuhi komitmen pencapaian target MDGs pada 2015 mendatang. Bahkan, penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan jangka menengah (RPJMN) ditargetkan lebih cepat daripada target MDGs sendiri. MDGs telah menjadi salah satu bahan masukan penting dalam penyusunan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.⁶

Bagi Indonesia, pencapaian target-target MDGs secara nasional masih memerlukan upaya bersama dengan melibatkan semua pihak terkait. Indonesia telah menerbitkan beberapa kali laporan pencapaian MDGs nasional bersama dengan beberapa negara kawasan Asia Pasifik.⁷ Melalui laporan tersebut, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk pencapaian MDGs hingga tahun 2015 melalui berbagai program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.⁸

Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2007 dari *United Nation Development Programme* (UNDP) menyebutkan bahwa pada tahun 2007, angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 16,58%, dengan populasi penduduk miskin tercatat sekitar 37,17 juta jiwa,⁹ sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2009 yang diukur dari pendapatan, riil per kapita, tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan kualitas pendidikan dasarnya, Indonesia berada di peringkat 111 dari 182 negara yang dinilai UNDP.¹⁰ Di kalangan negara anggota ASEAN, peringkat Indonesia itu jauh di bawah Filipina dan Thailand, bahkan berada di bawah Vietnam.¹¹ Menurut Laporan UNDP 2009 itu, peringkat IPM Indonesia menunjukkan belum adanya perbaikan yang signifikan jika dilihat dari beberapa indikator penting IPM, terutama pengurangan angka kemiskinan.¹²

ing Urban Policy and Politics". *Journal of International Development*, Vol. 12(6) 2007, hlm. 843-856

⁷ B. Haris White, "Destitution and Poverty of its Politics with Special Reference to South Asia", *World Development Journal*, Vol. 33, 2005, hlm. 881-891.

⁸ *Ibid*

⁹ P. Amis, P., 6(5) year 1994, "Indian Urban Poverty: Labor Markets, Gender and Shocks". *Journal of International Development*, hlm.635-643

¹⁰ UNDP, 2009, *Millennium Development Goals Report 2009*, New York: United Nation, hlm. 35

¹¹ Andi Suandi Hamid, "Targets and Strategies of Poverty Alleviation In Context of Energy Crisis and Global Warming", *Journal of ASEAN Economic's Assosiation*, Vol. 3/XXI, hlm. 2-11. Lihat pula F.Bourguignon, and S.R. Chakravarty, The Measurement of Multidimensional Poverty. *Journal of Economic Inequality*, Vol. 1(1), 2010, hlm.25-49

¹² Tim Penyusun Laporan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) Indonesia Tahun 2007, 2007, *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*, Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm. 5. Lihat pula S. Chen, S. and M. Ravallion, "How Did the World's Poorest Fare in the 1990s?". *Review of Income and Wealth*, Vol. 47(3), 2009, hlm. 283-300

² D. Brady, D, "Rethinking the Sociological Measurement of Poverty". *Journal of Social Forces*, Vol. 81(3) 2008, hlm.715-752

³ R. Castel, "the Roads to Disaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relationships", *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 24(3) 2009, hlm. 519-535

⁴ R. Prosterman & T. Hanstad, "Land Reform in the Twenty-Firt Century: New Challenges, New Responses", *Seattle Journal For Social Justice*, 2006, hlm. 763.

⁵ K. Deininger, 2003, *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*, World Bank Policy Research Report 2003, hlm. 12.

⁶ Tim Penyusun, 2008, *Laporan Perekonomian Indonesia*, Jakarta:Bank Indonesia, hlm. 15. Lihat pula J. Beall, "From the Culture of Poverty to Inclusive Cities: Refram-

Banyak kebijakan dan program yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk meringankan kemiskinan. Namun kebijakan dan program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan tidak tepat sasaran. Belum ada koordinasi yang baik antar departemen. Target dari kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan juga belum mengacu pada Target MDGs. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengharmonisasikan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan Deklarasi *Millennium Development Goals* dalam rangka menciptakan iklim kondusif untuk mengurangi kemiskinan.

Permasalahan

Ada dua permasalahan yang akan dibahas pada artikel ini. *Pertama*, apakah peraturan dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan sudah harmonis dengan Deklarasi *Millennium Development Goals*, khususnya Target 1?; dan *kedua*, bagaimana model harmonisasi peraturan dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang harmonis dengan Deklarasi *Millennium Development Goals*?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer sebagai penunjang. Data primer berasal dari informasi yang diterima dari informan, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pengentasan kemiskinan, kebijakan makro pengentasan kemiskinan, target *Millennium Development Goals* (MDGs). Bahan hukum sekunder berupa jurnal, baik nasional maupun internasional, dan buku referensi yang membahas pengentasan kemiskinan. Sedangkan bahan hukum tersier adalah ensiklopedi dan Kamus *Black Law*. Instrumen pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara. Wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terstruktur serta studi pustaka dilakukan dengan cara

content identification. Untuk menjaga kesahihan data primer maka dilakukan triangulasi data, yaitu data yang telah diperoleh dari suatu sumber dibandingkan dengan data dari sumber yang lain. Sedangkan untuk menjaga kesahihan data sekunder, dilakukan kritik sumber. Analisis data dilakukan dengan tehnik *editing analysis style*.¹³

Pembahasan

Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengentasan Kemiskinan yang Harmonis dengan Target Deklarasi *Millennium Development Goals*

Komitmen Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Karena itu, Deklarasi MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).¹⁴

Deklarasi MDGs¹⁵ berisi kesepakatan negara-negara tentang arah pembangunan berikut sasaran-sasarannya yang perlu diwujudkan. Secara ringkas, arah pembangunan yang disepakati secara global yang tercantum dalam Deklarasi MDGs meliputi: *pertama*, menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; *kedua*, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; *ketiga*, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; *keempat*, menurunkan kematian anak; *kelima*, meningkatkan ke-

¹³ Benyamin F. Crabtree, 1995, *Doing Qualitative Research*, London: Sage Publication, hlm 18.

¹⁴ R. Gaiha, "Is Growth Central to Poverty Alleviation in Asia?", *Journal of International Affairs*, Vol. 52(1), 2008, hlm. 145-180.

¹⁵ *United Nations Millennium Declaration*, yang kemudian dilegalikan oleh Majelis Umum PBB ke dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (A/RES/55/2. *United Nations Millennium Declaration*).

sehatan maternal; *keenam*, melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa); *ketujuh*, menjamin keberlangsungan lingkungan; dan *kedelapan*, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari kebijakan dan produk hukum yang dilahirkan setelah menjadi pihak dalam Deklarasi MDGs. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-empat mengenai tujuan negara yaitu "memajukan kesejahteraan umum" adalah sumber dari landasan hukum dan kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk hukum yang memberikan dasar bagi perencanaan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 Prioritas Keempat mengenai Program Aksi Penanggulangan Kemiskinan, memiliki target penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada tahun 2014, serta perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Penanggung jawab kebijakan ini adalah wakil presiden. Terdapat 27 program dalam kebijakan ini, dan tiap program dijabarkan ke dalam program-program pelaksana.

Selanjutnya, produk perundang-undangan yang mengatur pengentasan kemiskinan adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, serta Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Kemudian, setiap departemen memiliki program pengentasan kemiskinan dan memiliki produk hukum setingkat peraturan menteri dan Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam rangka mengatur program pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), sebagai peraturan teknis mengenai penanggulangan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 menentukan:

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, yaitu: *pertama*, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; *kedua*, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; *ketiga*, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; *keempat*, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 menyebutkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari: *pertama*, program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; *kedua*, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; *ketiga*, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; *keempat*, program-program yang lain yang baik langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan

kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 telah memberikan parameter bagi sepuluh program prioritas pemerintah, yang kemudian kesepuluh prioritas ini harus dijabarkan lebih lanjut oleh setiap kementerian dan lembaga negara. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka pemerintah membuat program pro rakyat, program keadilan untuk semua (*justice for all*), dan program pencapaian tujuan Pembangunan Millennium (MDGs). Sedangkan program pro rakyat memfokuskan pada: *pertama*, program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; *kedua*, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; *ketiga*, program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, program keadilan untuk semua memfokuskan pada: *pertama*, program keadilan pada anak; *kedua*, program keadilan bagi perempuan; *ketiga*, program keadilan di bidang ketenagakerjaan; *keempat*, program keadilan di bidang bantuan hukum; *kelima*, program keadilan di bidang reformasi hukum dan keadilan; *keenam*, program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.

Program pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium memfokuskan pada: *pertama*, program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan; *kedua*, program pendidikan dasar untuk semua; *ketiga*, program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; *keempat*, program penurunan angka kematian anak; *kelima*, program kesehatan ibu; *keenam*, program pengendalian HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; *ketujuh*, program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; *kedelapan*, program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Instruksi Presiden ini ditujukan kepada semua menteri dan kepala lembaga negara. Setiap lembaga diberi kewenangan untuk menjabarkan instruksi ini sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing lembaga. Instruksi ini

tidak memberi parameter yang jelas untuk penjabaran program di tingkat bawah.

Menurut Kepala Diputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Ceppie Kurniadi Sumadilaga, untuk penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah mencanangkan dua pokok kebijakan pembangunan. *Pertama*, mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan *kedua*, melaksanakan delapan jalur pemerataan yang meliputi: (a) pemerataan pembagian pendapatan; (b) pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh daerah; (c) pemerataan kesempatan berusaha; (d) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; (e) pemerataan kesempatan memperoleh kesehatan; dan (f) pemerataan kesempatan kerja. Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus Kabinet Indonesia Bersatu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini wajar mengingat masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia.

Menurut Ceppie Kurniadi Sumadilaga, kebijakan yang dituangkan dalam program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan program beras bagi masyarakat miskin (*raskin*) untuk mengurangi angka kemiskinan. Secara garis besar, program-program ini merupakan program yang bersifat *short-run* dan hanya memiliki *multiplier effect* yang rendah karena hanya dapat mereduksi gejala kemiskinan sesaat. Padahal, masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi permasalahan struktural, bukan permasalahan atau fenomena sesaat. Oleh karena itu, penanganan masalah kemiskinan di Indonesia harus mendapatkan perhatian ekstra serius dari pemerintah. Hal ini cukup penting mengingat konstitusi kita mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap warga negaranya, terutama orang miskin.

Berdasar pada penggunaan garis kemiskinan nasional, menurunkan angka kemiskinan setengahnya pada tahun 2015 dibandingkan posisi tahun 1990 merupakan tantangan yang sangat berat. Namun demikian pemerintah ti-

dak akan berpuas diri dengan semata-mata hanya menggunakan garis kemiskinan US\$ 1 per hari. Dalam melakukan perencanaan pembangunan pemerintah menggunakan garis kemiskinan nasional. Mengacu pada garis kemiskinan nasional Indonesia¹⁶ persentase penduduk miskin Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun selama 30 tahun terakhir.¹⁷ Pada tahun 1976, menurut BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 40,1%, kemudian turun menjadi 17,4% pada tahun 1987, dan terus menurun menjadi 11,3% pada tahun 1996. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 mengakibatkan persentase penduduk miskin melonjak kembali menjadi 24,2% pada tahun 1998. Pemulihan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 15,97% pada tahun 2005.¹⁸ Akan tetapi pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat lagi menjadi 17,75%.¹⁹ Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya angka inflasi karena Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak dalam negeri, diikuti dengan meningkatnya harga beras selama kurun waktu tersebut.²⁰ Naiknya harga bahan bakar minyak dalam negeri dilakukan demi menyehatkan perekonomian nasional, seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia. Di lain pihak, sebagai dampak positif dari beberapa program pembangunan dan membaiknya perekonomian, tingkat kemiskinan pada tahun 2007 turun menjadi 16,58%, dengan populasi penduduk miskin tercatat sekitar 37,17 juta jiwa.²¹

Tingkat kemiskinan atau proporsi jumlah orang miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1990 tercatat 15,10%, yang terus meningkat menjadi 17,75% pada tahun 2006 di seluruh dunia.²² Dengan menggunakan basis data tahun 1990, tingkat kemiskinan yang menjadi sasaran MDGs pada tahun 2015 ialah sekitar 7,5%.²³ Di sisi lain, krisis ekonomi yang terjadi dalam kurun 1997-1998 berakibat pada melonjaknya tingkat kemiskinan menjadi 24,1% pada tahun 1998. Oleh karena itu, akan lebih realistis apabila sasaran kemiskinan MDGs untuk tahun 2015 adalah setengah dari kondisi tahun 1998, yakni 12%.²⁴ Kemungkinan lain adalah dengan membuat kisaran yang menggabungkan sasaran berbasis tahun 1990 dan sasaran berbasis tahun 1998. Dengan demikian, sasaran tingkat kemiskinan MDGs Indonesia pada tahun 2015, dengan menggunakan garis kemiskinan nasional, adalah berkisar pada 7,5 -12%.²⁵

Selain indikator garis kemiskinan nasional dan indikator pendapatan di bawah US\$ 1 per hari, beberapa negara menerapkan pula indikator pendapatan di bawah US\$ 2 per hari per kapita.²⁶ Dengan menggunakan ukuran ini, maka pada tahun 2006 sekitar 49% penduduk hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 2 per hari.²⁷ Artinya lebih dari 41% penduduk hidup dengan pendapatan antara US\$ 1 dan US\$ 2 per hari.²⁸

Walaupun Indonesia telah mencapai sasaran MDGs, mengacu pada ukuran kemiskinan US\$ 1, namun tantangan yang lebih besar adalah bagaimana mengurangi jumlah orang miskin dengan mengacu pada garis kemiskinan nasional, dan lebih jauh lagi dengan menggunakan

¹⁶ Ukuran Garis Kemiskinan Nasional adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk makanan setara 2.100 kilo kalori per orang/hari dan untuk memenuhi kebutuhan non-makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya. Sumber: BPS, Statistik Indonesia, 2002.

¹⁷ S. Chen, & M. Ravallion, *The Developing World is Poorer than We Thought But No Less Successful in the Fight Against Poverty*, Laporan penelitian dalam *World Bank Policy Research Working Paper No. 4703*, Aug. 2008.

¹⁸ S. Chen, & M. Ravallion, *op.cit.*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ S. Rocha, "Metropolitan Poverty in Brazil: Economic Cycles, Labor Market and Demographic Trends", *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 19, 2005, hlm. 384-394. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia (hasil wawancara pada tanggal 18 Juli 2010).

²² K. Zhu, R. Prosterman, J. Ye, P. Li, J. Riedinger & Y. Ouyang, "The Rural Land Question in China: Analysis and Recommendations Based on a Seventeen-Province Survey", *New York University Journal of International Law and Politics*, 88 (4) 2006, hlm. 761.

²³ Hidayatullah, "Ilusi MDGs Mengentaskan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi*, Oktober 19 tahun 2010, hlm. 15

²⁴ *Loc.cit*

²⁵ *Ibid*, hlm. 17.

²⁶ J.B.G. Tilak, "Education and Poverty", *Journal of Human Development*, Vol. 3 (2) 2002. hlm. 191-207.

²⁷ D.A. Clark, Sen's, "Capability Approach and The Many Spaces of Human Well-being", *Journal of Development Studies*, Vol. 41(8), hlm. 1339-1368.

²⁸ *Ibid*

ukuran US\$ 2 per hari per orang.²⁹ Hal ini menggambarkan sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, bahwa penduduk yang hidup dekat dengan garis kemiskinan nasional atau sangat dekat dengan penduduk yang rentan (*vulnerable*) jumlahnya masih sangat besar.³⁰ Mereka adalah orang-orang yang tergolong rentan karena apabila terjadi goncangan ekonomi mereka dapat dengan mudah jatuh ke kelompok miskin dengan pendapatan di bawah US\$ 1 per hari.³¹

Indikator lain terkait dengan kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan.³² Indeks ini menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.³³ Pada tahun 2005, indeks kedalaman kemiskinan Indonesia cenderung membaik dibandingkan kondisi tahun 2003. Pada tahun 2006, indeks ini sempat meningkat hingga mencapai 3,43 namun menurun kembali menjadi 2,99 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2007 yang makin mendekati garis kemiskinan. Angka indeks kedalaman kemiskinan terburuk pada 2004 diduduki oleh Provinsi Papua (10,56), disusul Gorontalo (6,95), Maluku (6,32), Nanggroe Aceh Darussalam (6,32), dan Nusa Tenggara Timur (5,32).³⁴

Indikator berikutnya adalah proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil pertama). Indikator ini menginformasikan perbandingan pengeluaran kelompok penduduk 20% termiskin terhadap pengeluaran seluruh penduduk.³⁵ Pada tahun 1990, proporsi konsumsi 20% penduduk termiskin tercatat sebesar 9,3% dari konsumsi seluruh penduduk.³⁶ Dalam kurun waktu

15 tahun, perkembangan proporsi konsumsi penduduk termiskin berlangsung sangat lamban dan cenderung tidak bergeser terlampau jauh dari posisi di tahun 1990. Nilai indikator ini pada tahun 2002 mencapai 9,1% dan dua tahun berikutnya hanya meningkat menjadi 9,7%.³⁷

Tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dapat dilihat dari berbagai dimensi. Menurut Ceppie Kurniadi Sumadilaga ada beberapa tantangan tersebut. *Pertama*, menjaga kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan. Termasuk di dalamnya ialah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga kebutuhan pokok utama seperti beras, menjadi tantangan serius yang harus di hadapi. *Kedua*, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi; termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara yang sangat luas. *Ketiga*, melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pengalaman menunjukkan bahwa melibatkan serta meningkatkan kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif. *Keempat*, belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin. *Kelima*, adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antardaerah satu dengan lainnya.

Dimensi permasalahan kemiskinan yang sangat luas seperti dijelaskan di atas meng-

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

³⁰ R. Castel, "The Road to Disaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relationships", *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 24(3), hlm. 519-535.

³¹ *Ibid.*

³² World Bank Institute, 2007, *Government Indicator 2007 Country Data Report for Indonesia 1996-2006*, Washington: World Bank, hlm. 23.

³³ *Loc.cit*

³⁴ *Ibid*, hlm 25.

³⁵ P. Amis, "Indian Urban Poverty: Labor Markets, Gender and Shocks", *Journal of International Development*, Vol. 6(5) 1994, hlm.635-643.

³⁶ World Bank Institute, *op.cit.*

³⁷ *Ibid*

haruskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah kemiskinan pada akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, menyangkut multi-sektor, multi-pelaku, dan multi-waktu.

Menurut Ceppie Kurniadi Sumadilaga, penanggulangan kemiskinan di Indonesia akan dititikberatkan pada beberapa upaya. *Pertama*, mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Dua aspek penting berkaitan dengan hal ini adalah menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kegiatan ekonomi agar berpihak kepada penanggulangan kemiskinan. Langkah yang perlu diambil antara lain dengan menjaga tingkat inflasi, termasuk menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok seperti beras. *Kedua*, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk pelayanan keluarga berencana, serta infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dilakukan melalui pemberian beasiswa. Sementara itu, akses terhadap pelayanan kesehatan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin, termasuk pelayanan rumah sakit kelas tiga. *Ketiga*, berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat miskin, Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Program PNPM Mandiri ini selain bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, juga ditujukan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia. PNPM akan mencakup sekitar 2.700 kecamatan pada tahun 2007, 3.800 kecamatan pada tahun 2008, dan akhirnya 5.624 atau seluruh kecamatan di Indonesia pada tahun 2009. Masing-masing kecamatan akan memperoleh bantuan yang besarnya berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 1,5 miliar per tahun. *Keempat*, menyempurnakan

serta memperluas cakupan perlindungan sosial, terutama bagi mereka yang rentan.³⁸

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pencapaian target-target MDGs secara nasional masih memerlukan upaya bersama semua pihak terkait, salah satu diantaranya adalah melakukan harmonisasi hukum/kebijakan pengentasan kemiskinan dengan MDGs. Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap HAM.

Menyimak Tujuan 1 MDGs, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dengan Target 1 menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah US\$ 1 per hari menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1995-2015, dan Target 2 menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1995-2015, dan membandingkannya dengan tujuan PNPM Mandiri yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan, memberikan kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan infrastruktur, maka dapat dilihat adanya kurang harmoni dalam memaknai kemiskinan dan pengentasannya. MDGs dengan tegas dan lugas mengartikan kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendapatan, sementara pemerintah Indonesia memaknainya dengan kurang jelas, yaitu melebar ke pemaknaan kesejahteraan, yang tentunya akan berdimensi lebih luas dan semakin berat pencapaiannya karena beragamnya permasalahan yang harus diperhatikan. Tidak fokusnya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, juga tampak apabila menyimak tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu Indonesia yang aman, Indonesia yang adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih pada angka 16,58% atau sama dengan 37,17 juta penduduk. MDGs menargetkan bahwa pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin tersebut akan berkurang menjadi separuhnya. Sementara itu, Peme-

³⁸ Hasil wawancara dengan Koordinator PNPM Mandiri Pusat.

rintah Indonesia menargetkan penduduk miskin tersebut pada kisaran 7,5%-12% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Target ini harmonis dengan target MDGs bahkan dapat dikatakan lebih optimis. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana pencapaian target tersebut dapat terpenuhi sementara fokus pembangunan belum menitik kepada pengentasan kemiskinan. Pada tataran ini, Tim Peneliti berpendapat bahwa sudah pada saatnya Pemerintah Indonesia mengakui bahwa masih banyak rakyatnya yang miskin, lebih-lebih apabila indikatornya adalah penghasilan minimal US\$ 2 dolar per hari. Pengakuan ini ditindaklanjuti dengan prioritas program pembangunan yang mendukung pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa. Pendapat ini didasarkan pada premis dan kenyataan bahwa kemiskinan merupakan salah satu akar permasalahan dalam kehidupan individu, sosial kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa. Apabila kemiskinan ini dapat dientaskan, maka satu demi satu masalah sosial kemasyarakatan dan masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dapat diurai satu-persatu.

Secara operasional dapat dikemukakan di sini, Pemerintah Indonesia dalam rangka mengentaskan kemiskinan harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan kemiskinan selalu berkaitan erat dengan masalah pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan strategi pembangunan sektor-sektor penopang pembangunan perekonomian nasional, yaitu selain bertumpu kepada kemajuan dan kecanggihan teknologi juga diarahkan kepada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Langkah menyediakan lapangan kerja ini dilakukan dengan langkah-langkah pemberdayaan anggota masyarakat untuk paling tidak mampu menyediakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya, yang kemudian diikuti dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Pelatihan dan penanaman jiwa kewirausahaan sangat penting untuk dilakukan. Apabila program-program tersebut sudah dilaksanakan tetapi tetap saja masih ada anggota

masyarakat yang tidak dapat dientaskan dari kemiskinan, seperti yatim piatu dan anak-anak terlantar, maka mereka-mereka ini dipelihara oleh negara.

Setelah tujuan dan prioritas program diharmonisasikan dengan tujuan MDGs, langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menunjuk institusi yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana program pengentasan kemiskinan tersebut. Melihat program PNPM maka dapat diketahui bahwa Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana. Padahal apabila mencermati Tupoksi dari kementerian ini, maka dapat diketahui bahwa Tupoksinya tidak hanya kepada pengentasan kemiskinan saja, tetapi juga pada tugas-tugas lain, seperti penanganan bencana alam dan pemberantasan penyakit masyarakat. Pada tataran ini, Tim Peneliti sampai pada pendapat, bahwa akan tepat apabila pengentasan kemiskinan ini diserahkan kepada sebuah lembaga atau badan yang menangani dan mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan, misalnya Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, badan ini diberi akses ke kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, dan kementerian/lembaga tersebut memberikan dukungan sepenuhnya.

Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan tersebut mempunyai tugas awal untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan inisiatif Pemerintah sebagai program jangka pendek. Sambil melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan jangka pendek tersebut, tugas berikutnya adalah menjangkau aspirasi dan menyusun program pengentasan kemiskinan berbasis kebutuhan dan usulan-usulan dari warga masyarakat miskin dan warga masyarakat lainnya yang terkait, untuk kemudian dijadikan program jangka menengah. Sedangkan untuk program jangka panjang adalah sinkron dengan target MDGs dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan badan tersebut tentunya memerlukan payung hukum yang akan membidani kelahirannya. Alangkah baiknya apabila keberadaannya dapat disponsori oleh UNDP dan/atau badan-badan sejenis di tingkat regional dalam hal ini ASEAN. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, karena persoalan pengentasan kemiskinan tidak lagi merupakan isu nasional sebuah negara, tetapi sudah menjadi isu regional, bahkan isu internasional. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, bahwa kemiskinan di suatu negara akan berimbas dan menjadi beban ekonomi, sosial, dan kultural negara lain, atau lembaga-lembaga internasional.

Model Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Harmonis dengan Deklarasi *Millennium Development Goals*

Model yang ideal untuk mengharmonisasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada MDGs adalah model yang dapat memadukan antara program-program pengentasan kemiskinan (misalnya: Program PNPM Mandiri) dengan program-program perluasan lapangan pekerjaan, sektor-sektor penopang pembangunan perekonomian nasional, yaitu selain bertumpu kepada kemajuan dan kecanggihan teknologi juga diarahkan kepada sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Langkah menyediakan lapangan kerja ini dilakukan dengan langkah-langkah pemberdayaan anggota masyarakat untuk paling tidak mampu menyediakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya, yang kemudian diikuti dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Pelatihan dan penanaman jiwa kewirausahaan sangat penting untuk dilakukan. Apabila program-program tersebut sudah dilaksanakan tetapi tetap saja masih ada anggota masyarakat yang tidak dapat dikanakkan dari kemiskinan, seperti yatim piatu dan anak-anak terlantar, maka mereka-mereka ini dipelihara oleh negara. Setelah tujuan dan prioritas program diharmonisasikan dengan tujuan MDGs, langkah berikutnya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah menunjuk institusi yang menjadi penanggung-

jawab dan pelaksana program pengentasan kemiskinan tersebut. Melihat program PNPM maka dapat diketahui bahwa Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang menjadi penanggung jawab dan pelaksana. Padahal apabila mencermati Tupoksi dari kementerian ini, maka dapat diketahui bahwa Tupoksinya tidak hanya kepada pengentasan kemiskinan saja, tetapi juga pada tugas-tugas lain, seperti penanganan bencana alam dan pemberantasan penyakit masyarakat. Pada tataran ini, Tim Peneliti sampai pada pendapat, bahwa akan tepat apabila pengentasan kemiskinan ini diserahkan kepada sebuah lembaga atau badan yang menangani dan mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan, misalnya Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Nasional, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, badan ini diberi akses ke kementerian dan/atau lembaga lain yang terkait dengan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, dan kementerian/lembaga tersebut memberikan dukungan sepenuhnya.

Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan tersebut mempunyai tugas awal untuk menyusun program-program pengentasan kemiskinan inisiatif Pemerintah sebagai program jangka pendek. Sambil melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan jangka pendek tersebut, tugas berikutnya adalah menja-ring aspirasi dan menyusun program pengentasan kemiskinan berbasis kebutuhan dan usulan-usulan dari warga masyarakat miskin dan warga masyarakat lainnya yang terkait, untuk kemudian dijadikan program jangka menengah. Sedangkan untuk program jangka panjang adalah sinkron dengan target MDGs dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan badan tersebut tentunya memerlukan payung hukum yang akan membidani kelahirannya. Alangkah baiknya apabila keberadaannya dapat disponsori oleh UNDP dan/atau badan-badan sejenis di tingkat regional dalam hal ini ASEAN. Hal ini penting untuk dipertimbangkan, karena persoalan pengentasan kemiskinan tidak lagi merupakan isu nasional sebuah negara, tetapi sudah menjadi isu regional, bahkan isu internasional. Sudah tidak

menjadi rahasia lagi, bahwa kemiskinan di suatu negara akan berimbas dan menjadi beban ekonomi, sosial, dan kultural negara lain, atau lembaga-lembaga internasional. Model tersebut dapat dibayangkan di bawah ini.

Penutup
Simpulan

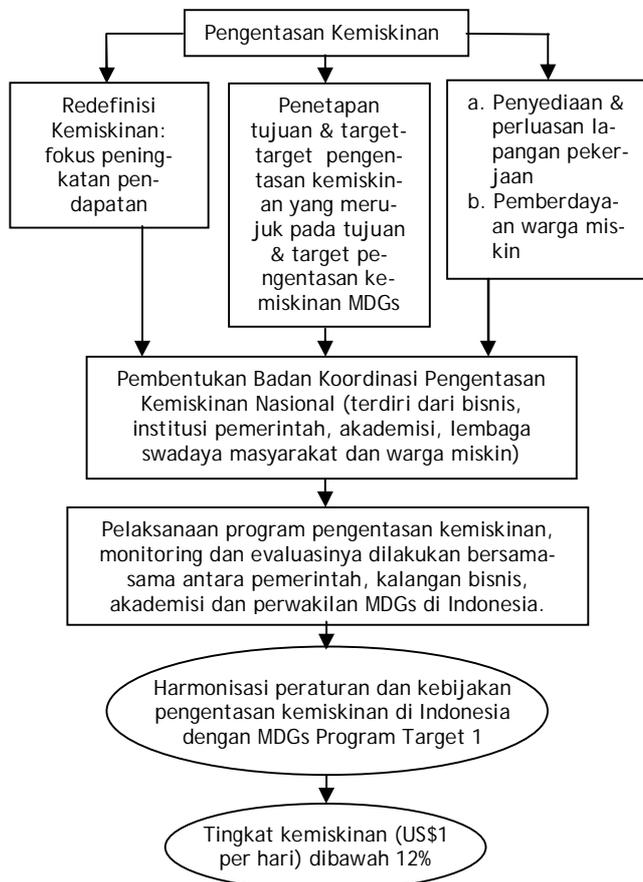
Pengentasan kemiskinan di Indonesia masih diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang apabila dikaji dengan cermat, antara peraturan yang satu dengan yang lain masih belum sinkron baik secara vertikal maupun horisontal. Selain itu, semua peraturan dan kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut juga belum harmonis dengan Target 1 Deklarasi *Millennium Development Goals* (MDGs). Hal ini karena definisi kemiskinan yang dirujuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia berdeda-beda. Oleh sebab itu perlu dilakukan redefinisi kemiskinan. Agar harmonis dengan Target MDGs, maka definisi yang dipakai adalah: kemiskinan absolut, yaitu mereka yang berpenghasilan kurang dari US\$ 1 per hari. Langkah ini kemudian diikuti pengaturan dan kebijakan dalam satu produk peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program pengentasan kemiskinan yang merupakan program *bottom up* dari pemerintah.

Model harmonisasi yang ideal untuk pelaksanaan pengentasan kemiskinan berbasis program *bottom up* Pemerintah adalah Pemerintah menyediakan dibentuk sebuah Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan yang keanggotaannya lintas kementerian, kalangan bisnis, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan MDGs sebagai konsultan. Badan ini bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.

Saran

Pemerintah segera melakukan sinkronisasi vertikal maupun horizontal terhadap semua peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan. Pemerintah segera membentuk sebuah Badan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan yang ke-

anggotaannya lintas kementerian, kalangan bisnis, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan MDGs sebagai konsultan. Badan ini bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.



Bagan 1

Model Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Harmonis dengan MDG's

Daftar Pustaka

Amis, P. "Indian Urban Poverty: Labor Markets, Gender and Shocks". *Journal of International Development* Vol. 6 No. 5 1994;
 -----, "Indian Urban Poverty: Labor Markets, Gender and Shocks". *Journal of International Development*, Vol. 6 No. 5, 1994;
 Beall, J. "From the Culture of Poverty to Inclusive Cities: Reframing Urban Policy and Politics". *Journal of International Development*, Vol. 12 No. 6 2007;
 Bourguignon, F. and S.R. Chakravarty. "The Measurement of Multidimensional Poverty". *Journal of Economic Inequality*, Vol. 1 No. 1, 2010;

- Brady, D. "Rethinking the Sociological Measurement of Poverty". *Journal of Social Forces*, Vol. 81 No. 3 2008;
- Castel, R. "The Road to Disaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relationships". *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 24 No. 3 2009;
- Chen, S. & M. Ravallion. 2008. *The Developing World is Poorer than We Thought But No Less Successful in the Fight Against Poverty*. Laporan Penelitian dalam World Bank Policy Research Working Paper No. 4703, Aug;
- , "How Did the World's Poorest Fare in the 1990s?". *Review of Income and Wealth*, Vol. 47 No. 3, 2009;
- Clark, D.A. and Sen's. "Capability Approach and The Many Spaces of Human Well-being". *Journal of Development Studies*, Vol. 41 No. 8;
- Crabtree, Benjamin F. 1995. *Doing Qualitative Research*. London: Sage Publication;
- Deininger, K. 2003. *Land Policies for Growth and Poverty Reduction*. World Bank Policy Research Report;
- Gaiha, R. "Is Growth Central to Poverty Alleviation in Asia?". *Journal of International Affairs*, Vol. 52 No. 1, 2008,
- Hamid, Andi Suandi. "Targets and Strategies of Poverty Alleviation In Context of Energy Crisis and Global Warming". *Journal of ASEAN Economic's Assosiation*, Vol. 3/XXI;
- Hidayatullah. "Ilusi MDGs Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Ekonomi*, Oktober 19 Tahun 2010;
- Prosterman, R.& T. Hanstad. "Land Reform in the Twenty-First Century: New Challenges, New Responses". *Seattle Journal For Social Justice*, 2006;
- Prosterman, Roy L.; Robert Mitchel, Tim Hans-tand (eds). 2007. *One Billion Rising: Law, Land and The Alleviation of Global Property*. Nederland: Leiden University Press;
- Rocha, S. "Metropolitan Poverty in Brazil: Economic Cycles, Labor Market and Demographic Trends". *International Journal of Urban and Regional Research*, Vol. 19, 2005;
- Tilak, J.B.G. "Education and Poverty". *Journal of Hu-man Development*, Vol. 3 No. 2 2002;
- Tim Penyusun Laporan Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) Indonesia 2007. 2007. *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*. Jakarta: Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
- Tim Penyusun. 2008. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia;
- UNDP. 2009. *Millennium Development Goals Report 2009*. New York: United Nation;
- White, B. Haris. "Destitution and Poverty of its Politics with Special Reference to South Asia". *World Development Journal*, Vol. 33, 2005;
- World Bank Institute. 2007. *Government Indicator 2007 Country Data Report for Indonesia 1996-2006*. Washington: World Bank;
- Zhu, K.; R. Prosterman, J. Ye, P. Li, J. Riedinger & Y. Ouyang, "The Rural Land Question in China: Analysis and Recommendations Based on a Seventeen-Province Survey", *New York University Journal of International Law and Politic*, Vol. 88 No. 4, 2006.